



RIBUAN PERANGKAT RT DAN RW DIKUKUHKAN Pelimpahan Wewenang, Wilayah Jangan Terbebani

YOGYA (KR) - Ribuan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) masa bakti 2015-2018 resmi dikukuhkan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Walikota berharap, program pelimpahan wewenang yang ia gulirkan tidak membebani aparaturnya yang ada di wilayah.

Haryadi mengatakan, pengurus RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program pemerintahan. "Sejak tahun lalu program pelimpahan wewenang hingga tingkat kelurahan dan kecamatan sudah berjalan. Bahkan tahun ini semakin ditingkatkan. Pengurus RT dan RW tentu ditunggu partisipasinya secara aktif, paparnya dalam perkuliahan Pengurus RT dan RW se-Kota Yogyakarta di gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Jumat (22/5) malam.

Sedikitnya terdapat 615 RW dan 2.532 RT di Kota Yogyakarta yang berhasil dikukuhkan. Seluruhnya merupakan pemegang pemerintahan di tingkat paling bawah dan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Haryadi menambahkan, program pelimpahan wewenang sengaja digulirkan guna pemerataan pembangunan. Wilayah kini memiliki ke-

wenangan yang cukup signifikan dalam membangun daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, diingatkannya agar jajaran Pengurus RT dan RW agar mampu menafsirkan pelimpahan wewenang sebagai peluang dalam partisipasinya bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat paling bawah.

"Dengan adanya pelimpahan kewenangan di tingkat wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang sudah cukup besar, saya harap perangkat RT dan RW tidak merasa terbebani namun justru dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalurkan aspirasinya dengan turut aktif dalam pembangunan," jelas Haryadi.

Pelimpahan wewenang pertama kali digulirkan tahun 2012 lalu melalui Peraturan Walikota (Perwal) 52/2012. Namun tahun 2014 lalu disempurnakan dengan Perwal 41/2014. Dalam Perwal tersebut dijabarkan tujuh urusan yang kini menjadi kewenangan Camat dan Lurah. Yakni urusan otonomi daerah, perdagangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan umum, kesehatan dan kebudayaan. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005